

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Utama :

Al Qur'an

Al Hadist

B. Buku-Buku :

Adijani al-Alabij, 2002, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ali Achmad Chomsah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 2*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditra Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

A.W Widjaja, 1999, *Etika Administrasi Negara*, Cet. ke-2, Bumi Aksara, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Asikin Zainal H. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anonim. 2009. *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*. Jakarta

A.P.Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landform*, Bagian I, Mandar Maju, Bandung.

_____, 1982, *Pedoman Pelaksanaan UUPA Dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung.

Bachsan Mustafa, 2000, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung.

- Boedi Harsono, 2000, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- _____, 2000, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Badudu-Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian*. Media Press. Semarang.
- Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang. 2014. *Menyiapkan PPAT yang Berkompeten Bagi Mahasiswa Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula*, DPHTGR dan Unissula, Semarang.
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudahnya Berlakunya UUPA*, Armico, Bandung.
- E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbitan dan Balai buku Ichtiar, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 1991, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muijadi, 2003, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. ke-2*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, *Telaah Ulang: Kewenangan PPATU untuk Membuat Akta, Bukan Mengisi Blanko/Formulir Akta*, Renvoi 3.44.IV (Januari 2007).
- _____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pertanahan*, Jakarta, Harvarindo, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Media Notariat Edisi April-Juni 2003.
- J. Andy Hartanto, 2012, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cet. Ke-2, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Penerbit Undip, Semarang.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- M. Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta.
- Paulus Effendie Lotulung, 1996, *Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Fungsi PPAT menurut PP Nomor 10 Tahun 1961*, Media Notariat Nomor 38-41, Jan-Apr-Jul-Okt 1996.
- Philipus M. Hadjon, 1996, *Akta PPAT Bukan Keputusan Tata Usaha Negara*, Media Notariat Nomor 38-41, Jan-Apr-Jul-Okt 1996.
- Plorianus SP Sangun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Cet.1, Jakarta, 2007.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Reza Febriantina, 2010, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& B*, Alfa Beta, Bandung.

- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, dan H. Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, ***Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia***, Binacipta, Jakarta.
- Sri Winarsih, 2002, ***Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum***, Majalah YURIDIKA Volume 17 No. 2, Maret 2002.
- Soedharyo Soimin, 2004, ***Status Hak dan Pembebasan Tanah***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, ***Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta***, Mandar Maju, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 1988, ***Hukum dan Politik Agraria***, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- _____, 2006, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Edisi ke-7 Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Sahat HMT Sinaga, 2007, ***Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak***, Pustaka Sutra, Bandung.
- Soelarman Brotosoelarno, ***Aspek Teknis Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah***, Yogyakarta : Deputi Menteri Negara Agraria Kepala BPN , Makalah Seminar. 1997.
- Urip Santoso, 2010, ***Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah***, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Yuherman, 2012, ***Konsekuensi Peralihan Kewenangan Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas***, Jurnal Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta.
- Y.W. Sunidhia dan Ninik Widyanti, 1998, ***Pembaharuan Hukum Agraria***, Bima Aksara, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ***Undang-Undang Pokok Agraria***

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang ***Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah***

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang ***Pendaftaran Tanah***

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang ***Pejabat Pembuat Akta Tanah***

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ***Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah***

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang ***Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah***

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang ***Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.***

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang ***Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan***

D. Jurnal/Makalah/Koran/Majalah :

Boedi Harsono, ***Polemik Kelangkaan Blanko Kembalikan Pada Filosofinya***, Jakarta, Majalah Renvoi Nomor 8.44.IV tanggal 3 Januari 2007.

_____, ***PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya***, Majalah RENVOI Nomor 844.IV, Januari 2007.

Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang. 2014. ***Menyiapkan PPAT yang Berkompeten Bagi Mahasiswa Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula (Makalah)***, DPHTGR dan Unissula, Semarang.

Irawan Soeroredjo, ***Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Profesi***, Jakarta, Newsletter, Nomor 29/VIII/Juni, 1997.

N.G. Yudara, ***Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Otentik***, Makalah, Jakarta 8 Juni 2001.

Syahrudin, *Banyak Blanko Palsu Beredar di NAD Negara Dirugikan Puluhan Milyar*, Majalah RENVOI, Nomor 11.47.IV tanggal 3 April 2007.

Wawan Setiawan, 1996, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Media Notariat Nomor 38-41, Jan-Apr-Jul-Okt 1996.

E. Internet/Website/Situs:

Anthonius Adhi Soediby, 2011, *Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak*, diakses pada tanggal 9 Januari 2016, jam 23.12 Wib, tersedia URL : <http://kenalhukum.blogspot.com/2011/01/larangan-penggunaan-surat-kuasamutlak.html>

Anonim, 2014, *Hak Atas Tanah*, tersedia : URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, data diakses tanggal 31 Januari 2016, , jam 12.44 Wib.

Abd, Muiz Kabry, *Pengertian, Hukum, Rukun, Dan Syarat Jual Beli*, tersedia URL : <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-jual-beli/>, data diakses tanggal 31 Januari 2014, jam 12.44 Wib.

Bambang S. Oyong, 2013, *Peraturan KBPN Nomor 8 Tahun 2012 Dalam Kajian Tugas Pekerjaan PPAT*, diakses pada tanggal 3 Februari 2016, jam 08.10 Wib, tersedia : URL : <http://bambangoyong.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-enus-x-none.html>

Citra Putri, 2012, *Kajian Yuridis Eksistensi PPAT Selaku Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik*, diakses pada tanggal 7 Februari 2016, jam : 23.11 Wib, tersedia : URL : <http://apakabarakta.blogspot.com/2012/12/kajian-yuridiseksistensi-ppat-selaku.html>.

Fikri, 2011, *Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, tersedia : URL : <http://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/>, data diakses tanggal 31 Januari 2016, jam 12.44 Wib.

Letezia Tobing, 2013, *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris*. diakses pada tanggal 9 Januari 2016, jam 21.33

Wib, tersedia URL :
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50dbbb8cb848d/akibat-hukum-jualbeli-tanah-warisan-tanpa-persetujuan-ahli-waris>

Rizal, 2011, *Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, diakses pada tanggal 2 Februari 2016, jam 15. 23 Wib, tersedia : URL : <http://myrizal-76.blogspot.com/2011/08/peran-ppat-dalam-peralihan-hak-atas.html>.

Hukum Property, 2014, *Pengetahuan Hukum Agrarian Dan Pertanahan Di Indonesia*, tersedia : URL : <http://www.hukumproperti.com/tag/hak-milik/>, data diakses tanggal 31 Januari 2016, jam 12.44 Wib.